

Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber Daya di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Nur Hesthria¹

¹ UIN Raden Fatah Palembang; nurhesthria_uin@radenfatah.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Implementasi Kegiatan;
Aktivitas Ekonomi;
Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ekonomi Islam pada kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan dalam perspektif ekonomi Islam ialah dapat membuat barang dan jasa dengan jalan yang adil dan tidak mengarah pada kerusakan. Konsumsi dalam perspektif Islam yakni bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri melainkan dapat memberi manfaat pada orang yang membutuhkan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Distribusi dalam perspektif Islam memberikan makna bahwa pendistribusian barang dan jasa dapat bersikap adil, menjauhi riba, masyir dan gharar. Ekonomi syariah diharapkan dapat diimplementasikan di Indonesia dengan menguatkan kontrol pada pelaku ekonomi khususnya pemerintah. Prinsip syariah dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi dan distribusi yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersihan, kemurahan hati serta tidak menumpuk harta (bantuan) sehingga jauh dari masyir, gharar dan riba.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nur Hesthria

UIN Raden Fatah Palembang; nurhesthria_uin@radenfatah.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi ialah berkembangnya kegiatan dalam perekonomian sehingga menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga mengakibatkan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka Panjang (Untoro, 2010). Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam serta perkembangan teknologi dengan indikator pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatkannya pendapatan nasional, meningkatnya pendapatan perkapita, jumlah pengangguran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat kemiskinan menurun (Kompas, 2022).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan tersebut kegiatan ekonomi di Indonesia turut berkembang yang dipengaruhi beberapa aktivitas yakni aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Salah satu kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi ialah kegiatan perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat terbuka dimana tidak

ada hambatan bagi siapapun untuk masuk atau keluar dari sektor ini. Perkembangan kegiatan perdagangan meliputi peran serta masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha sebagai produsen barang dan jasa, dan pedagang sebagai penjual kepada konsumen. Sektor komersial ini dianggap sebagai alternatif terbaik bagi pekerja non-pertanian (Fitriyanti, 2018).

Dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, Pemerintah memainkan tiga peran penting dalam kegiatan ekonomi yakni produsen, konsumen, dan pengelola ekonomi. Seperti pelaku ekonomi lainnya, dalam perannya sebagai produsen rumah tangga, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan umum. Saat berperan sebagai produsen, rumah tangga pemerintah bertugas menyediakan berbagai fasilitas umum. Pemerintah akan memonopoli sektor produksi, seperti bahan bakar, air, dan makanan. Kemudian saat menjalankan perannya sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah akan melakukan konsumsi dengan belanja rutin yang terdiri dari pembayaran gaji pegawai pemerintah. Sementara itu, rumah tangga pemerintah akan menjalankan perannya sebagai pengendali perekonomian dengan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Berbagai kebijakan yang dilakukan ialah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional (Safitri et al., 2021).

Di era tahun 2022 implementasi kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan pemerintah antara lain bantuan kompor listrik, Bantuan Langsung Tunai dan Beras Sejahtera, pemerintah mengharapkan kegiatan alokasi ini dapat membantu masyarakat dalam menopang kehidupan yang lebih baik. Bantuan kompor listrik merupakan inisiatif pemerintah dalam mengimplikasikan model tangga energi bahwa rumah tangga yang meniru utilitas dalam memaksimalkan pola konsumsi neoklasik. Peralihan bahan bakar adalah konsep sentral dalam proses transisi energi, dan mengacu pada perubahan dari satu bahan bakar ke bahan bakar lainnya. Bahan bakar tangga energi dipesan sesuai dengan preferensi rumah tangga berdasarkan atribut fisik seperti kebersihan, kemudahan penggunaan, kecepatan memasak, dan efisiensi bahan bakar (Kompas, 2022).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan inisiatif pemerintah dalam menangani kemiskinan. Menurut (Akib, 2021) BLT merupakan pemberian dalam jumlah tetap (tunai) kepada orang miskin setelah pemerintah memutuskan untuk memotong subsidi dan menaikkan harga bahan bakar, selisih inilah yang diberikan kepada rakyat miskin sebagai BLT. Program ini sebagai pengganti kenaikan biaya hidup rakyat miskin sebagai dampak dari kenaikan BBM, adapun besaran BLT dihitung dari seberapa besar kenaikan biaya hidup penduduk miskin terhadap inflasi sebagai akibat dari langsung atau tidak langsungnya kenaikan BBM.

Kegiatan Beras Sejahtera merupakan implementasi kebijakan dari presiden mengenai perberasan nasional, dimana menginstruksikan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota mengupayakan peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional khususnya Perum Bulog. Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri (Rachman et al., 2018).

Penyaluran beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sasaran dengan menutupi sebagian dari kebutuhan gizi berasnya (Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera, 2018). Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar mereka. Tujuan dari program Rastra adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM untuk memenuhi kebutuhan gizi beras dengan menyalurkan beras bersubsidi dengan tarif 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan pedoman pemerintah pusat (Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera, 2018).

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi satu persatu masalah yang dialami sangat baik, namun kebijakan yang diambil pemerintah sebagai produsen disalurkan dengan bantuan agar sampai ke pihak konsumen yaitu masyarakat tidak serta merta berjalan dengan baik. Masalah pendistribusian ini merupakan salah satu hal terbesar yang dihadapi pemerintah. Kendala

pendistribusian ini muncul dari lemahnya kontrol pemerintah kepada “perpanjangan tangan” dari pemerintah pusat ke masyarakat sehingga bantuan tidak terkoordinasi, efektif dan akuntabel.

“Perpanjangan Tangan” dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota belum dapat dikontrol dengan baik karena masih terdapat oknum-oknum yang mempermainkan bantuan tersebut misalnya dalam harga, mutu yang tidak baik serta jumlah yang dikurangi. Hal ini terjadi karena lemahnya penerapan Ekonomi Syariah di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ini. Penerapan ekonomi syariah dalam pendistribusian bantuan ini mampu menghindari dalam kegiatan yang mengandung halMagrib (Maysir, Gharar dan Riba). Penerapan pendistribusian secara syariah mampu menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, mendapat rahmat dari Allah SWT dan Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian bagaimana Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber daya di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemangku kepentingan untuk lebih memahami permasalahan sehingga dapat menemukan jalan keluar dalam ekonomi syariah sehingga dapat dirumuskan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dalam konsep syariah.

2. METODE

Jenis penelitian ini berupa studi literature yang menurut Danial (2019), menjelaskan bahwa studi literatur adalah penelitian yang mengumpulkan beberapa buku, artikel dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial yang di teliti secara mendalam, luas dan menyeluruh (Rukin, 2019). Sumber data yang digunakan peneliti yakni data sekunder yang merupakan data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun seperti jurnal, buku cetak dan majalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Pedoman Kehidupan

Terdapat perbedaan pandangan pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan dimulai dari sudut pandang yang berbeda, perbedaan pendapat tentang arti dan tujuan hidup. Ini menyimpang dari konsep dasar kapitalisme Tujuan utama konsep dasar kapitalis ialah kebutuhan materi tanpa batas, barulah muncul sikap dalam pengiriman barang dan jasa tanpa batasan. Berbeda dengan Islam walaupun Islam memandang kebutuhan materi, namun tidak melupakan unsur moral-spiritual dan tidak menempatkan materi sebagai tujuan utama, sebagaimana yang terjadi dalam ajaran Islam. Orang tidak hanya menjalani kehidupan di dunia ini, orang hidup dibangkitkan di akhirat. Sikap ini dibangun sejak awal dalam kehidupan sosial, politik atau ekonomi.

Perbedaan utama antara konsep pertumbuhan Islam dan konsep yang dilakukan pemerintahan sekarang (Konvensionalisme) terletak pada prinsip yang diterapkan, dalam Islam unsur spiritualitas (Agama) diutamakan. Yang dimaksud religi disini adalah ajaran agama muncul dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Meskipun prinsip pertumbuhan (Ekonomi) dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dengan segala ajarannya sebagai sumber dan panduan perilaku manusia, karena tindakan dan perilaku bisnis adalah Bagian dari aktivitas manusia kemudian setiap aktivitas ekonomi harus dalam sistem Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman tidak hanya mengatur mengenai ibadah, namun memberi aturan yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) untuk semua aktivitas manusia, termasuk masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kesempurnaan ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah perekonomian yang merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan perspektif tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam islam memiliki sebuah konsep dasar yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif ini kewajiban *kifayah* dipandang aktivitas ekonomi, sehingga aktivitas

ekonomi menjadi tuntutan langsung dalam agama Islam. Segala aktivitas ekonomi yang dijalankan melalui syariat Islam adalah ibadah (A. A. Karim, 2004)

Dari sudut pandang Islam, terjadinya penyelewengan distribusi kepada masyarakat tentu saja tidak terlepas dari praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti masyir, gharar dan riba (dalam arti luas), monopoli, korupsi dan penyelewengan lainnya. Jika para pelaku ekonomi terbiasa beroperasi di luar tuntunan ekonomi ilahi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa krisis ekonomi yang menimpa kita adalah bencana yang sengaja dibuat oleh tangan manusia.

Hal ini sebagaimana Allah SWT tunjukkan dalam Surat Ar-Rum ayat 41 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Dalam kajian ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli pemikiran ekonomi Islam klasik. Sebagaimana dibahas dari firman Allah SWT. Surat Hud ayat 61 "Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Ungkapan "kemakmuran" menyiratkan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada gubernurnya di Mesir: "Kita harus lebih memperhatikan kemakmuran planet daripada arah pemungutan pajak, karena pajak itu sendiri hanya dapat dioptimalkan melalui kemakmuran negara. Siapa yang memungut pajak tanpa mempertimbangkan kemakmuran planet, negara." akan dihancurkan (Aisyah, 2019).

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan terus menerus dari faktor-faktor produksi yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Islam, pertumbuhan ekonomi merupakan masalah nilai. Pertumbuhan faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika, produksi tersebut mencakup barang-barang yang telah terbukti memiliki efek merugikan dan merugikan manusia. Selain itu, perubahan ekonomi merupakan kegiatan menyeluruh di bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distributif.

Pertumbuhan ekonomi, menurut Islam, bersifat multidimensi, yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, dan tujuannya bukan hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan masa depan. Keduanya bersatu secara integral menurut Islam. Salah satu prinsip dasar Islam adalah iman bahwa perilaku setiap muslim adalah cerminan dan ekspresi ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua kegiatan Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain hubungan vertikal dengan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pendistribusian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah mandate dari Allah SWT yang ditekankan dalam Surat Q.s. al-Syûrâ ayat 4: "Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Mahaagung, Mahabesar"

Menurut al-Syawkânî, isi ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik sebenarnya harta adalah Allah SWT. Jadi semua yang ada di surga dan di bumi dalam kekuasaan Allah. Semua ini menunjuk pada kemahakuasaan Allah dan manusia hanyalah pemegang mandat Allah yang harus melaksanakan perintah-Nya. Menganalisis ayat di atas, hal ini terbukti bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bukan dimiliki oleh kalangan tertentu melainkan dimiliki oleh semua jenis manusia. Sehingga manusia berhak mendapatkan rezeki di bumi ini tanpa adanya monopoli kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

3.2. Konsep Ekonomi Syariah

Islam memiliki konsep sistem kehidupan yang universal, terpadu dan menyeluruh yang menciptakan tatanan yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang paling kompleks. Dan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan seni dan budaya.

Sehingga konsep Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai tumpuan perekonomian negara, perekonomian akan berjalan lebih baik dan selaras dengan cita-citanya. Namun faktanya, tidak semua negara Muslim di dunia mengadopsi dasar ini.

Perkembangan ekonomi Islam semakin luas ini adalah refleksi dari masyarakat Indonesia yang menginginkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan islami serta di ridhoi Allah SWT. Dukungan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini merupakan awal Bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi Islam di dalam negeri yang secara tidak langsung sebagai pembaharuan dalam negeri serta awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, misalnya berdiri Bank Muamalat tahun 1992.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan konsep pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah dan bersumber dari Al-Qur'an dengan kesadaran bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi secara langsung harus disertai dengan konsep pertumbuhan ekonomi modern. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Islam, oleh karena itu seluruh aktivitas manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus mengacu pada hukum Islam, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Konsep Ekonomi Syariah (Satria, 2015)

Nilai-nilai ekonomi Islam yang pada hakekatnya merupakan turunan dari kesadaran bahwa segala sesuatu mutlak milik Allah, enam prinsip dasar ekonomi syariah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diterapkan secara parsial dan berpijak pada nilai-nilai ekonomi Islam tersebut. Terwujudnya interaksi enam prinsip dasar secara simultan dan holistik mengarah pada sistem ekonomi Islam yang adil dan terpadu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam pergerakan roda ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip dasar ini secara terus-menerus merangsang perputaran ekonomi dan menyalurkan semua pelaku sesuai dengan kehendak Tuhan.

Prinsip-prinsip pertumbuhan ekonomi syariah dalam perspektif Islam menurut Darussalam (2019) yaitu 1) Pembangunan ekonomi merupakan keseimbangan dari berbagai faktor agar tidak terjadi kelangkaan dan usaha tetap berdiri multidimensi; 2) Dalam ajaran Islam, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda komprehensif dan mencakup unsur-unsur moral, spiritual dan material; 3) Fokus utama pembangunan adalah pada lingkungan budaya masyarakat; dan 4) Ajaran Islam menunjukkan bahwa pembangunan lebih bersifat utilitarian Sumber daya sebanyak-banyaknya atas apa yang Allah berikan untuk semua orang dan seluruh lingkungan.

Berdasarkan Karim (2017), ekonomi syariah diibaratkan sebuah bangunan yg didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid (penghambaan total pada Allah), al-'adl (keadilan), nubuwwah (meneladani Sunah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), serta ma'ad (berorientasi keakhiratan). Nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya sebagai sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu artinya *multiple ownership* (kepemilikan majemuk), *freedom of act* (kebebasan berperilaku), dan *social justice* (keadilan sosial).

Prinsip *multiple ownership* dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia merupakan kepemilikan yang sifatnya titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada akhirat atas alokasi serta penggunaan harta mereka di dunia. Islam mengakui kepemilikan pribadi. Namun untuk menghilangkan perilaku tidak adil, pemerintah harus mengontrol produksi barang-barang tertentu, terutama yang penting bagi kehidupan umat.

Freedom of Act mengartikan bahwa manusia sebagai insan yang mandiri yang bebas dalam melakukan sesuatu, namun tidak mengganggu aktivitas orang lain, kebebasan manusia dalam melakukan sesuatu ini dapat dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Prinsip ini secara tidak langsung dapat memberikan pengarahannya kepada pemerintah selalu menjaga mekanisme perekonomian karena *freedom of act* mampu membentuk mekanisme pasar yang mana terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian masyarakat. Prinsip *social justice* yang artinya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, atau dapat diartikan tidak menzalimi sesama. Peran pemerintah di prinsip ini penting. Dalam beberapa situasi pemerintah memiliki hak untuk mengintervensi harga dan pasar.

Di atas segala prinsip, hal yang berharga ialah akhlak. Akhlak merupakan hal utama yang dapat dijadikan sebagai tujuan islam di muka bumi. Implementasi kegiatan yang dilakukan pemerintah jika disertai dengan akhlak maka akan mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama islam seperti: kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas serta transparansi informasi serta terhindar dari Masyar, Riba dan Gharar.

3.3. Membangun Perekonomian Ideal Melalui Peran Ekonomi Syariah

Perekonomian dapat dikatakan ideal jika perekonomian tersebut secara terus menerus tumbuh dalam jangka waktu tahunan atau triwulan tanpa mengalami penurunan. sehingga berdampak stabilnya kondisi harga dan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan distribusi) terjaga dengan baik agar roda perekonomian terus berjalan. Namun, dalam kenyataannya kondisi perekonomian pada umumnya mengalami gelombang pasang surut. Setiap negara pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Hal ini dapat dicapai apabila setidaknya negara dapat memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain

Terjadinya kenaikan atau penurunan PDB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Terjadinya kenaikan PDB menunjukkan peningkatan ekonomi suatu negara karena ekonomi di negara tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut, PDB yang terindikasi produksi barang dan jasa dapat dilihat berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung sehingga dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Indonesia 2019-2022



Gambar 2. PDB Atas Dasar harga Konstan (Badan Pusat Statistik, 2022)

Pada tahun 2022, PDB ADHK kuartal I tumbuh sebesar 5,01 persen nilai PDB ADHK pada kuartal I tahun ini mencapai Rp 2.818,58 triliun. Sedangkan nilai PDB ADHK pada kuartal I tahun lalu sebesar Rp 2.684,02 triliun, Pertumbuhan signifikan ini juga karena ada *low base effect* (kecenderungan perubahan absolut kecil dari jumlah awal yang rendah) pada triwulan I 2021 yang kita ketahui ekonomi Indonesia meningkat sebesar 0,7 persen (BPS, 2022).

Pertumbuhan ekonomi tidak terbatas pada kegiatan produksi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan produksi yang komprehensif dimana erat kaitannya dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual umat manusia. Pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam yakni mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh pemerintahan kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi dalam paham kapitalis yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan.

Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam Surah Al-A'raf ayat 96 "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan".

Dari ayat tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah harus mulai dikembangkan di Indonesia untuk mewujudkan perekonomian ideal, hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari kegiatan ekonomi yakni produksi, konsumsi dan distribusi.

Produksi memberikan manfaat serta nilai pada suatu barang dan jasa. Produksi merupakan usaha untuk menciptakan kekayaan dengan menggunakan sumberdaya alam oleh manusia. Islam memandang produksi ialah sebuah usaha untuk mengupayakan sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia di dunia. Dalam islam segala bentuk produksi yang dibuat atau diperoleh dengan jalan yang salah dan tidak adil sangat diharamkan. Input dan output dalam produksi wajib sesuai dengan hukum islam dan tidak mengarah pada kerusakan.

Produksi kompor listrik yang dilaksanakan, memberikan kesempatan bagi perusahaan besar turut ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah, perusahaan tersebut antara lain PT Adyawinsa Electrical and Power, PT Maspion Elektronik, PT Hartono Istana, PT Selaras Citra dan PT Sutrandu (Fauzan, 2022). Perusahaan ini diharapkan dapat memproduksi secara syariah dimana kompor hasil produksi dapat meningkatkan manfaat/faedah terhadap suatu nilai serta dapat mengupayakan sesuatu demi kelangsungan hidup manusia, dimana menurut Monzer (1997), pengambilan manfaat (listrik) dari setiap partikel alam (komponen pembuat kompor listrik) merupakan tujuan idilogik umat islam. Hal ini mempunyai konotasi bahwa manusia diberikan peluang untuk mengambil manfaat (konsumsi) dari alam dengan cara yang halal.

Imam Al Ghazali mengatakan apabila memproduksi barang-barang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar maka hukumnya ialah Fardhu Kifayah, hal ini beranggapan bahwa jika ada sekelompok orang telah berkecimpung dalam usaha untuk memproduksi barang dalam jumlah tertentu (sesuai dengan kebutuhan), maka kewajiban masyarakat telah tepenuhi. Namun apabila sekelompok orang tersebut memproduksi barang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tidak adil), sehingga akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas pembagian kompor listrik secara gratis, bantuan lainnya ialah Bantuan Langsung Tunai (*cash transfer*). Bantuan Langsung Tunai sangat diharapkan dilakukan secara syariah untuk mendukung perekonomian ideal karena apabila kaum fakir atau miskin membutuhkan bantuan namun sedekah (zakat) mengalami kekosongan, maka seorang kepala Negara (imam) diperbolehkan mengambil kas pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kas pajak atau baitul mal ini merupakan persiapan terakhir kepunyaan suatu Negara untuk membantu umat yang kekurangan, Karena baitul mal ini merupakan milik semua orang bukan kepemilikan amir (kepala Negara) atau sekoelompok orang tertentu. Islam memberikan aturan yang harus diperhatikan umat muslim. Penggunaan akhir barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup merupakan definisi dari konsumsi.

Konsumsi dalam islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarga namun dapat memberi manfaat bagi orang yang membutuhkan. Konsumsi dalam islam tidak terbatas dalam pemenuhan kebutuhan fisik saja namun didalamnya terdapat proses social dengan mengeluarkan harta dijalan Allah baik itu zakat, infaq dan sodaqoh. BLT ini secara tidak langsung dapat menciptakan pemerataan ekonomi jika dikonsumsi pada pihak yang membutuhkan tidak diambil scara zalim atau serakah serta harus dibagikan secara adil dan merata. Perwujudan adil dalam BLT ini tidak mengambil harta yang bukan kita sebagai pemiliknya (tidak serakah) dan tidak merugikan orang lain.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai konsumsi selain prinsip keadilan yang sebaiknya diterapkan dalam BLT, yakni prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan dan prinsip kemurahan hati. Dalam kegiatan beras sejahtera atau bantuan sosial pangan, prinsip kebersihan lebih diutamakan. Islam sangat mementingkan kebersihan dalam semua aspek hidup manusia, terutama makanan yang dimakan oleh umat. Kebersihan makanan dalam islam memberikan kebaikan dalam keseluruhan hidup.

Pengkonsumsian beras sejahtera oleh umat dapat memberikan kebaikan apabila pemerintah memberikan beras yang bersih (tidak menimbulkan bau apek, banyak batu di beras tersebut dan kotor), higienis atau tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya (tidak diberi pemutih), serta lezat dan nikmat apabila dimasak menjadi nasi. Kebersihan dalam islam memberikan peranan penting bagi tubuh dalam menangkal penyakit serta mempengaruhi pembentukan watak. Segala sesuatu yang bersih akan dapat mempengaruhi pembentukan watak yang baik, sebaliknya makanan yang kotor akan menjadikan jasmani dan rohani yang secara tidak langsung akan menjadikan watak yang kotor.

Pendistribusian kompor listrik, BLT dan Beras sejahtera tidak lepas dari peran pemerintah baik itu dinas terkait dan perangkat desa sebagai pelaku ekonomi. Pendistribusian yang dilakukan pemerintah harus dilakukan menurut islam yang memiliki dua prinsip yakni prinsip kebebasan yang segala tindakan harus dibalut dalam nilai agama dan prinsip keadilan yakni keseimbangan antara

individu dengan materi yang dimilikinya. Prinsip kebebasan artinya pemerintah bebas menetapkan siapa saja warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan syarat yang ditetapkan, serta keadilan pemerintah dalam hal mengimplementasikan kegiatan ini memiliki sikap adil dimana pemberian bantuan ini harus diberikan kepada orang/warga yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam keberlangsungan hidup.

Pendistribusian untuk ketiga kegiatan agar dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang ideal sesuai islam ialah menjauhi riba dalam hal ini mengambil tambahan dalam setiap bantuan dan menimbun bantuan (baik kompor listrik, BLT maupun Beras Sejahtera), islam sangat melarang melakukan penimbunan harta karena sama saja menutupi aliran rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Lemahnya kontrol pemerintah sangat berpengaruh dalam membangun perekonomian sesuai dengan konsep syariah,, untuk itu sangat diperlukan orang-orang yang baik dalam bersikap, watak dan akhlak sehingga dapat terwujud kegiatan yang adil, bersih, jujur serta terhindar dari masyir, gharar dan riba..

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, implikasi kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi di Indonesia masih kapitalis. Ekonomi syariah di harapkan dapat diimplementasikan di Indonesia dengan menguatkan kontrol pada pelaku ekonomi khususnya pemerintah. Prinsip syariah dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi dan distribusi. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip keadilan, prinsip, kebersihan, prinsip kemurahan hati serta tidak menumpuk harta (bantuan) sehingga jauh dari masyir, gharar dan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). *Nasihat Ali Kepada Gubernur Mesir*.
- Akib. (2021). *Dampak Umpan Balik dan Insentif Bagi Pemerintah*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *PDB Atas Harga Konstan*. 2022.
- Danial. (2019). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Darussalam, A. Z., Adilah, A. N., Berlian Berlian, & Danial, M. (2019). Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 266.
- Fauzan, M. R. (2022). *5 Perusahaan Ini Sigap Garap Produksi Kompor Listrik*. 2022.
- Fitriyanti. (2018). *No Title*. IAIN SALATIGA.
- Karim, A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *Raja Grafindo Persad*. Raja Grafindo Persada.
- Kompas. (2022). *No Title*.
- Monzer, K. (1997). *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Islam*. Penerjemah. M. Nastangin. Pustaka Pelajar.
- Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera. (2018). *No Title*.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Akhmar Cendikia Indonesia.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Satria, C. (2015). *Keterkaitan Antara prinsip Dasar dan cara Islam Menghidupkan Ekonomi*. STEBIS IGM.
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi*. Kawah Media.